

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang dikenal sebagai negara agraris karena kaya akan hasil alamnya, dan sebagian besar mata pencaharian penduduk Indonesia di bidang pertanian. Negara Indonesia telah dikaruniai kondisi alam yang mendukung, hamparan lahan yang luas, keragaman hayati yang melimpah, dan beriklim tropis yang sinar matahari terjadi sepanjang tahun sehingga petani bisa bercocok tanam sepanjang tahun yang mana hal ini menjadi keuntungan bagi petani di Indonesia. Keuntungan yang didapat di negara Indonesia ini seharusnya mampu meningkatkan kesejahteraan bagi petani dan penduduk Indonesia dalam mencukupi kebutuhan pangan serta membangkitkan negara menjadi lebih Makmur. Meskipun belum optimal, pertanian menjadi salah satu sektor rill yang memiliki peran sangat nyata dalam membantu penghasilan devisa negara. (Warsani, 2013)

Dimensi ketahanan pangan mencakup dampak kebijakan pemerintah terhadap pendapatan produsen/petani (Dewan Ketahanan pangan dalam Abidin, 2015). Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2013 menyebutkan bahwa “Petani perlu diberi perlindungan dan pemberdayaan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan guna mewujudkan ketahanan pangan secara berkelanjutan”. Jadi, dalam Undang-Undang tersebut pemerintah wajib

mendukung dan mendorong petani dalam mewujudkan ketahanan pangan negara dan menjadi petani yang sejahtera.

Pada tahun 2018 penduduk negara Indonesia mencapai 265 juta jiwa menurut BPS (Badan Pusat Statistik, 2019), hal ini yang menyebabkan kebutuhan akan beras sebagai makanan pokok di negara Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Pertanian di Indonesia sangat berperan penting dalam membantu peranan komoditi pangan negara. Kebutuhan beras di Indonesia tidak akan pernah surut tetapi malah akan terus bertambah sesuai dengan bertambahnya penduduk di Indonesia dari tahun ke tahun. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 4 tentang pangan menyebutkan bahwa “Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan”.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Pasal 3 tentang pangan menyatakan bahwa “Penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan”. Pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang merupakan hal yang paling mendasar dalam bertahan mewujudkan ketahanan pangan nasional, kebutuhan pangan nasional diatur oleh negara

sehingga masyarakat bisa mencukupi kebutuhan sehari hari. Pangan selalu digambarkan dengan beras kerana jenis pangan ini merupakan makanan pokok utama (Bulog, 2014).

Beras adalah komoditas pangan utama yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Indonesia (Septiadi dkk, 2016). Dalam mencukupi kebutuhan pangan di Indonesia, pemerintah mencukupinya dengan cara mengimpor dari negara negara lain seperti Thailand, Vietnam, Pakistan, India, dan negara lainnya. Impor beras di Indonesia cukuplah besar dari negara-negara lainnya melalui perdagangan internasional. Islam memiliki nilai dan konsep yang berbeda dengan pandangan atau konsep pada ekonomi kapitalisme, islam memberikan rambu-rambu perdagangan internasional tidak hanya pada aspek komoditi semata namun juga pada subjek pelaku perdagangan. Dalam permasalahan impor yang terjadi islam telah memusatkan perhatiannya pada subjek pelaku perdagangan. Seperti telah disebutkan dalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 275 :

وَإِذَا لَمْ يَأْتِ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : *“dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba”*.

Ayat tersebut telah menegaskan tentang perintah kepada hambanya bahwasanya Allah SWT memperbolehkan untuk melakukan perdagangan dan melarang riba dalam setiap transaksi. Pada dasarnya aktifitas Impor dalam islam di suatu negara telah diperbolehkan karna impor merupakan bagian dari

aktifitas perdagangan yang masuk pada aspek muamalah baik secara bilateral maupun multilateral.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”
(Q.S. An-Nisa’: 29)

Makna dari ayat di atas yaitu perniagaan atau perdagangan dalam sistem jual-beli sangat dianjurkan dan diperintahkan oleh Allah SWT. Akan tetapi dalam perdagangan juga harus diperhatikan dalam mengimplementasikannya agar menghindarkan manusia dari jalan yang bathil dalam sistem pertukaran sesuatu yang menjadi milik antara sesama manusia.

Pertanian di Indonesia belum dapat mencukupi kebutuhan pangan negara. Pentingnya beras dalam memenuhi kebutuhan pangan, pemerintah harus terus berupaya untuk meningkatkan ketahanan pangan terutama yang bersumber dari peningkatan produksi dalam negeri. Dalam memenuhi kebutuhan pangan negara, pemerintah memerlukan ketersediaan pangan dalam jumlah cukup dan tersebar ke seluruh provinsi, Indonesia harus menjaga

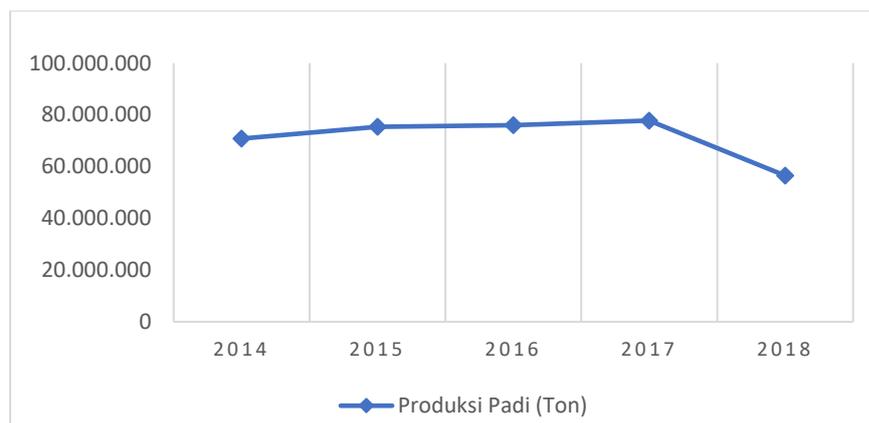
ketahanan pangannya sesuai kecukupan konsumsi maupun stok nasional yang cukup. (Bulog, 2014)

Tabel 1.1
Produksi Padi 2014-2018

Tahun	Produksi Padi (Ton)
2014	70.840.465
2015	75.397.841
2016	76.011.744
2017	77.786.504
2018	56.537.774

Sumber : BPS dan Kementerian Pertanian Indonesia (2019)

Grafik 1.1
Produksi Padi Tahun 2014-2018



Sumber : BPS dan Kementerian Pertanian Indonesia setelah diolah (2019)

Dari tabel 1.1 menjelaskan data 5 tahun terakhir produksi padi di Indonesia yaitu tahun 2014-2018, di tahun 2014-2017 dalam data produksi padi di Indonesia ini memiliki tren yang selalu mengalami kenaikan pada tiap

tahunnya, akan tetapi pada tahun 2018 tren tersebut berubah sebab mengalami penurunan pada produksi padi. Naik turunnya data jika dilihat dari tabel kurang terlihat secara jelas, maka dari data tabel 1.1 tersebut peneliti olah menjadi grafik, hal tersebut dapat dilihat pada grafik 1.1.

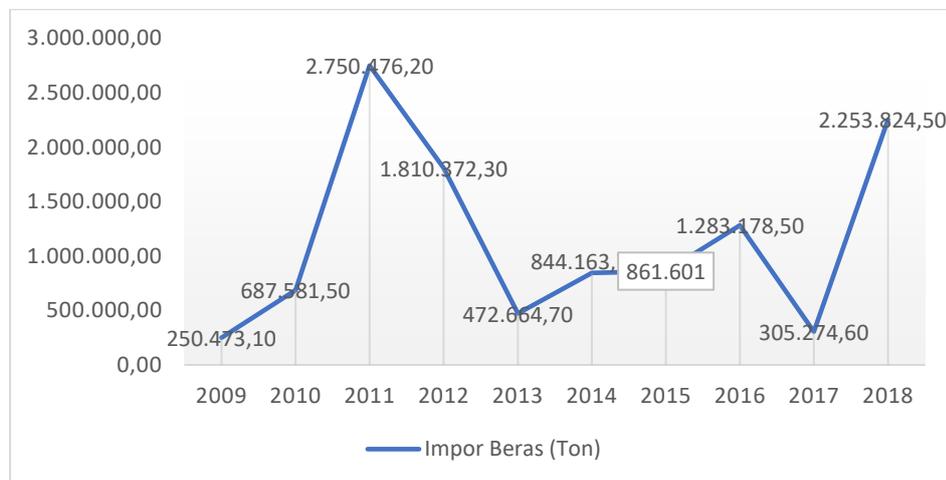
Dari tabel 1.1 dan grafik 1.1 dapat terlihat jelas bahwa dimulai dari tahun 2014 produksi padi di angka 70.840.465 ton padi dan terus mengalami peningkatan secara terus menerus dari tahun 2014-2017 dimana mencapai angka 77.786.504 ton padi, tetapi pada tahun 2018 ternyata produksi padi penurunan yang cukup besar yaitu menjadi angka 56.537.774 ton padi. Jadi dapat disimpulkan pada tahun 2014-2017 produktivitas padi selalu mengalami peningkatan di tiap tahunnya, tetapi di tahun terakhir yaitu tahun 2018 produktivitas padi mengalami penurunan dan hal tersebut mempengaruhi impor beras pada tahun 2018.

Setelah 74 tahun merdeka, Indonesia belum berhasil mencukupi kebutuhan pangan dari produksi sendiri. Swasembada beras hanya dapat dicapai pada tahun 1984 dan 2008. Diluar tahun tersebut, pemenuhan kebutuhan pangan sebagian masih bergantung pada impor. (Swastika, 2011)

Kebijakan impor beras bisa dikatakan sangat penting apabila diambil kebijakan pada saat-saat krisis, misalnya pada saat stok beras didalam negeri sedang defisit, maka kebijakan impor perlu dan dapat dikatakan wajib untuk dilakukan impor. Namun pada tahun 2018, meskipun kementerian pertanian sudah memastikan pasokan beras hingga masa panen pada maret tahun 2018

masih dalam batas aman, tetapi kementerian perdagangan tetap membuka keran impor beras bagi sekitar 500.000 ton beras yang berasal dari Vietnam dan Thailand yang telah dating pada januari 2018 (Dikutip dari media cetak/online Voaindonesia.com yang diakses pada tanggal 19 November 2019 23:47 WIB). Berikut grafik data tentang impor beras di Indonesia :

Grafik 1.2
Impor Beras Indonesia Tahun 2009-2018



Sumber : Badan Pusat Statistik setelah diolah (2019)

Dari Grafik 1.1 di atas dapat dilihat bahwa impor beras di Indonesia selama rentang waktu 10 tahun yaitu 2009-2018 menurut grafik tersebut mengalami fluktuasi, dimulai dari tahun 2009 tergolong rendah dimana memiliki nilai sebesar 250.473,10 ton beras yang di impor, lalu pada tahun 2010 impor beras mengalami sedikit peningkatan yaitu sebesar 687.581,50 ton beras, dilanjutkan pada tahun 2011 impor beras di Indonesia mengalami kenaikan yang cukup besar yaitu senilai 2.750.476,20 ton beras tahun ini merupakan angka impor beras terbesar dalam 10 tahun terakhir ini, pada tahun 2012 impor beras mengalami penurunan yaitu sebesar 1.810.372,30 ton beras,

selanjutnya pada tahun 2013 impor beras di Indonesia juga mengalami penurunan dari 3 tahun sebelumnya yaitu sebesar 472.664,70 ton beras, di tahun 2014 impor beras mengalami sedikit peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 844.163,70 ton beras dan tahun 2015 juga mengalami sedikit peningkatan sebesar 861.601 ton beras, tetapi pada tahun 2016 impor di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu senilai 1.283.178,50 ton beras lalu pada tahun 2017 pun impor beras mengalami penurunan yaitu senilai 305.274,60 ton beras, akan tetapi walaupun pada tahun 2017 impor beras telah mengalami penurunan di tahun 2018 impor beras telah mengalami peningkatan yang sangat besar dari beberapa tahun sebelumnya yang senilai 2.253.824,50 ton beras yang mana pada tahun ini telah menimbulkan konflik dalam impor beras di Indonesia. Produksi padi pada tahun 2018 sangat mempengaruhi pada impor beras tahun 2018 juga dan itu terbukti saat produksi padi rendah ditahun tersebut maka impor beras pun naik yang tergolong tinggi. Jadi, dalam data yang telah di dapat dari badan pusat statistik (BPS) dalam 10 tahun terakhir ini Indonesia telah mengalami fluktuasi dalam impor beras, naik turunnya impor tergolong sangat besar dan terkadang rendah.

Badan Pusat Statistik (BPS) telah mencatat pemerintah Indonesia telah melakukan impor beras sebanyak 2,25 juta ton dengan nilai US\$ 1,03 miliar disepanjang tahun 2018. Impor beras pada tahun 2018 ini bersamaan dengan masa panen petani Indonesia, walaupun kementerian pertanian Indonesia telah menyatakan persediaan beras sudah aman akan tetapi kementerian perdagangan tetap melakukan impor beras dalam jumlah yang sangat besar.

Komoditas beras masih mempunyai peranan yang strategis baik sebagai komoditas politis maupun ekonomi. Implikasinya adalah diperlukan adanya upaya penyediaan pangan (beras) yang diikuti dengan pendistribusian yang memadai. (Kariyasa,K ,2017)

Sekitar 20 ribu ton stok cadangan beras pemerintah (CBP) tahun 2019 yang disimpan oleh perum bulog terancam busuk, terjadi karena telah berada digudang selama 4 bulan dan belum disalurkan sehingga mengalami penurunan mutu (dikutip dari media cetak/online liputan6.com yang diakses pada 3 desember 2019 15:43WIB). Hal tersebut telah menyebabkan kerugian pada negara karena beras telah di impor dengan uang negara, maka jika 20 ribu ton beras dimusnahkan maka kementerian keuangan perlu menggantinya dengan uang negara.

Seiring berlakunya pasar bebas alias globalisasi, arus barang termasuk produk pertanian seperti halnya bahan pangan pokok akan semakin bebas dan mudah memasuki wilayah Indonesia, ini menjadi potensi ancaman bagi petani lokal dan berpotensi menimbulkan ketergantungan pangan kita kepada asing. (Kementrian Pertanian Indonesia, 2019)

Sehubungan dengan latar belakang tersebut, peneliti mengangkat judul skripsi yaitu “**Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Impor Beras Di Indonesia; Pendekatan *Partial Adjustment Model (PAM)* Tahun 1985-2018**” dengan variabelnya adalah produksi padi, konsumsi beras, harga beras, luas lahan sawah dan PDB.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Latar Belakang di atas telah menjadi permasalahan dalam penelitian ini, sehingga membentuk rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh produksi padi terhadap Impor beras di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh konsumsi beras terhadap impor beras di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh harga beras terhadap impor beras di Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh luas lahan sawah terhadap impor beras di Indonesia?
5. Bagaimana pengaruh PDB terhadap impor beras di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pengaruh produksi padi terhadap impor beras di Indonesia pada tahun 1985-2018
2. Mengetahui pengaruh konsumsi beras terhadap impor beras di Indonesia tahun 1985-2018
3. Mengetahui pengaruh harga beras terhadap impor beras di Indonesia tahun 1985-2018
4. Mengetahui pengaruh luas lahan sawah terhadap impor beras di Indonesia pada tahun 1985-2018
5. Mengetahui pengaruh PDB terhadap impor beras Indonesia tahun 1985-2018

D. Manfaat Penelitian

Dilihat dari latar belakang dan tujuan penelitian, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak lain dari hasil penelitian ini, adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu :

1. Dapat digunakan sebagai kajian ilmiah agar dapat mengetahui pengaruh luas lahan sawah, produksi padi, konsumsi beras, harga beras, dan PDB terhadap impor beras yang berada di Indonesia
2. Sebagai referensi atau rujukan untuk peneliti lain yang mempunyai permasalahan yang sama seperti penelitian ini.
3. Dapat menjadi pertimbangan pemerintah untuk menjalankan kebijakan pangan pada impor beras.